

**PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Julia Hernida

NPM. 1621020378

Jurusan : Siyasah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2019 M

**PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, M.Ag

Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, M.A

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Dalam kehidupan bernegara, diskriminasi terhadap hak asasi seseorang banyak terjadi bahkan setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu, peran negara dalam melindungi hak-hak tersebut juga dipertanggungjawabkan untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif tanpa diikuti oleh tabel statistik dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, penulis menggunakan jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesi telah diperhatikan sedemikian rupa terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia yang tujuannya untuk melindungi hak-hak dari manusia itu sendiri. Islam juga memandang kewajiban atas negara dalam menjalankan perannya sebagai pelindung bagi Hak Asasi Manusia untuk seluruh masyarakatnya, haruslah maksimal dan setiap hak harus terpenuhi, di karenakan hak tersebut mutlak berasal dari Allah SWT dan tidak seorangpun dapat mengganggu gugat. Namun, dalam praktiknya diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia masih banyak di jumpai karena ketidak adilan yang berasal dari penguasa itu sendiri.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julia Hernida

NPM : 1621020378

Jurusan/Prodi : Siyasa

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung,

Penulis,

Julia Hernida

NPM. 1621020378



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

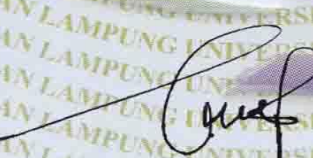
Nama : JULIA HERNIDA
NPM : 1621020378
Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
**Judul : "PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Siti Mahmudah, M.Ag.
NIP.196706041997032004


Abdul Qodir Zaelani, M.A
NIP.198206262009011015

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah


Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP.197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** disusun oleh, **Julia Hernida, NPM : 1621020378**, program studi **Siyasah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan pada hari/tanggal : **22 November 2019**.

TIM PENGUJI

Ketua

: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Sekretaris

: Fathul Mu'in, M.H.I.

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji I : Dr. Siti Mahmudah, M.Ag

Penguji II : Abdul Qodir Zaelani, M.A

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 1962102199930311002.

MOTTO

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”. (Q.S. Al-Hadid (57): 25)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya Heri Erfandi dan Sumarni, yang telah memberi support dalam berbagai bentuk kebutuhan baik secara materil maupun cinta dan kasih sayang. Adik-adik saya yang tercinta Whendri Alhafiz dan Anindita Keisha Zahra yang telah memberi semangat membara untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Untuk semua keluarga, sahabat yang selalu mendoakan dan menantikan kelulusan dengan harapan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan untuk almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Julia Hernida, dilahirkan di Noman pada tanggal 25 Juli 1997, anak pertama dari pasangan Heri Erfandi dan Sumarni.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Noman dan selesai pada tahun 2009. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Noman dan selesai pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Maur dan selesai pada tahun 2012. Madrasah Aliyah (MA) Diniyyah Putri Lampung dan selesai pada tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I TA.2016/2017.

Selama menjadi siswa dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan intra maupun ekstra. Pernah menjadi Bendahara Osis di SMP Negeri Maur, menjadi Wakil Ketua Pramuka Gugus Depan Diniyyah Putri Lampung, menjadi Sekretaris Majalah Tunas Diniyyah Putri Lampung, menjadi Bendahara Kohati HMI Komisyariat Syariah Cabang Bandar Lampung.

Bandar lampung,

Yang Membuat,

Julia Hernida

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrohiim

Puji Syukur penulis limpahkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, ilmu pengetahuan, kekuatan, serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran dan agama-Nya.

Skripsi yang berjudul “Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Islam” disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Tata Negara pada program studi (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan serta kekeliruan karena semata-mata keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., MH. Selaku Ketua Jurusan Siyasah.
4. Dr. Siti Mahmudah, M.Ag. Selaku Pembimbing I.
5. Abdul Qodir Zaelani, MA. Selaku Pembimbing II.
6. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan member masukan selama penyusunan skripsi.
7. Kedua orangtuaku, Adik-adikku dan seluruh keluarga besar yang telah member semangat dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus untuk anak-anaknya.
8. Sahabat-sahabat karibku Andi Saputra dan Maya Oktia Sari yang selalu member semangat serta menemaniku dalam mencari bahan skripsi.
9. Sahabat-sahabat Mahasiswa kelas Internasional angkatan 2016, Mia Nanda Alviana, Putri Tania, Ratih Purwaningsih, Sari Asmiatien, Widya Indriani, Muhammad Sofyan Yusuf, MMQ Alfian Rowiyan, Ramada Hendrian, Nanang Galung Sundawa. Yang telah sama-sama berjuang dan menemaniku selama menuntaskan pendidikan ini.
10. Seluruh keluarga, sahabat, teman-teman, dan orang-orang yang telah memberikan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kerangka Teori.....	9
H. Telaah Pustaka.....	11
I. Metode Penelitian.....	13

BAB II : HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM

A. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	17
B. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	19
C. Kesesuaian antara Undang-undang dan Konsep Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam.....	26

BAB III: HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	33
B. Sejarah Hak Asasi Manusia.....	35
C. Macam-macam Hak Asasi Manusia dan Aplikasinya di Indonesia.....	42
D. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia.....	46

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	55
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman dan keliruan di dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini adalah “Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Negara adalah organisasi wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.¹
2. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia, keberadaannya di yakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.²
3. Islam adalah serangkaian peraturan yang di dasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Kepada para nabi/rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci.³

¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2008), h.1069.

² Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.6.

³ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h.37-38.

4. Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.⁴

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Ingin mengetahui peran dan fungsi negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia menurut hukum positif.
- b. Ingin mengetahui pandangan hukum Islam mengenai Hak Asasi Manusia.

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan tentang peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam perspektif hukum Islam ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti, sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h.1.

C. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat,. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat rinci.

Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. Namun di samping Hak Asasi Manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang dimanapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.⁵

Deklarasi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah ada sejak jaman dahulu namun baru diikrarkan pada pedoman dasar negara yaitu yang berada di dalam

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h.89-90.

pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak asasi selaku manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia".

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.⁷

⁶ Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif". *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. I No.1 (Tahun 2017), h.69-70.

⁷ Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Inovatiff*, Vol. 8 No.1 (Tahun 2015), h.73.

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Prinsip ini dengan tegas disebutkan dalam Al-qur'an surah Al- Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

*“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”*⁸

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kewajiban dan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, menurut kodrat dan fitrahnya masing-masing sehingga tidak ada perbedaan jenis kelamin, ras, suku dan warna kulit.⁹ Kesadaran akan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia dan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*human centred development*). Konsep Hak Asasi Manusia berakar dari penghargaan terhadap martabat manusia sehingga menempatkan manusia sebagai subjek bukan objek, yang memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa dibedakan.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 517.

⁹ Djazimah Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim* (Yogyakarta: PT Lkis, 2011), h.28.

Interprestasi dan interdisipliner dalam hukum semakin lama semakin dibutuhkan oleh setiap manusia mengingat semakin banyaknya kasus-kasus kejahatan di era globalisasi yang terus bermunculan, seperti kejahatan *cyber crime*, *white color crime*, *terrorism*, dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam menyelesaikan kasus-kasus kontemporer tidak cukup dengan menggunakan pendekatan monodisipliner, dan penyelesaian dengan cara tersebut dianggap kurang komprehensif (belum tuntas) sehingga masih menyisakan masalah.¹⁰

Hak Asasi Manusia telah mengajarkan prinsip-prinsip universal persamaan dan kebebasan kepada manusia sehingga semestinya tidak ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta pembatasan hak dan pengekangan terhadap manusia yang lainnya.¹¹

Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia sebenarnya bukan hanya dilakukan dalam kasus-kasus politik seperti kasus Timtim, Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Maluku dan sebagainya melainkan terjadi juga dalam kasus-kasus penanganan masalah-masalah kriminal yang biasa. Masih banyak dijumpai dalam praktik penegakan hukum tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti, Proses penanganan perkara di kepolisian yang berlarut-larut yang memakan waktu yang sangat lama, bahkan terdapat proses tawar menawar apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Tidak jarang ada perkara yang sampai dua tahun belum dilimpahkan ke pengadilan tanpa adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dihambatnya seorang tersangka pelaku tindak

¹⁰ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 1 (Tahun 2016), h.9.

¹¹ Yahya Ahmad Zein, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan HAM)". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2015), h. 93.

kejahatan untuk mendapatkan bantuan hukum atau hambatan untuk berhubungan dengan pengacaranya.¹²

Pada Tahun 2004 Munir Said Thalib seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam sejarah hidupnya banyak menangani kasus besar seperti pembunuhan aktivis buruh Marsinah, Munir juga membela aktivis yang hilang karena penculikan. Sikap berani dan sigapnya dalam menentang ketidakadilan membuat Munir tak disukai oleh pemerintah. Munir meninggal dunia di atas pesawat yang membawanya terbang ke Amsterdam untuk melanjutkan pendidikan setelah meminum jus jeruk.¹³ Pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap dalang dari pembunuhan Munir. Namun dokumen hasil penyelidikan TPF itu hilang sehingga dalang pembunuhan Munir tidak terungkap.¹⁴

Tidak terungkapnya dalang dari kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia juga dirasakan oleh penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang disiram air keras setelah sholat subuh oleh dua orang pengendara motor yang tidak dikenal. Cairan tersebut mengenai wajah Novel yang mengakibatkan cacat permanen pada satu bola matanya.¹⁵

¹² Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 14 (Tahun 2000), h.5-6.

¹³ "Mengenang Munir, Dibunuh di Udara 14 Tahun Silam" (On-line) , tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/07/15120951/mengenang-munir-dibunuh-di-udara-14-tahun-silam>. (7 September 2018).

¹⁴ "14 Tahun Kasus Munir, Dokumen TPF Hilang hingga Pollycarpus Bebas" (On-line), tersedia di: <https://nasional.tempo.co/read/1124404/14-Tahun-kasus-munir-dokumen-tpf-hilang-hingga-pollycarpus-bebas> (7 September 2018).

¹⁵ Mei Amelia R, "Kronologi Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan" (On-line), tersedia di: <https://m.detik.com/news/berita/d-3470948/kronologi-penyiraman-air-keras-terhadap-novel-baswedan> (11 April 2017).

Ironinya, Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seharusnya dapat menjamin hak-hak para pembela kebenaran terutama mengungkap fakta-fakta yang dapat mengancam keselamatan para pejuang kebenaran dan pembela Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam hal ini penulis mengangkat judul “Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penggunaan perspektif Islam ini karena Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga sedikit atau banyak Indonesia akan terpengaruh dengan penafsiran dari Al-Qur'an maupun Hadis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah:

1. Bagaimana peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan penerapan akademis dari teori-teori yang ada terutama ilmu Siyasah pada umumnya dan khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Siyasah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Kerangka Teori

Pembahasan pokok dalam penelitian ini terdiri atas, Hak Asasi Manusia, pandangan hukum Islam mengenai Hak Asasi Manusia dan peran negara dalam melindungi Hak asasi Manusia. Poin-poin tersebut akan dijabarkan dalam bentuk yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat memecahkan masalah yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah. Ketiga bagian tersebut dapat dikonstruksikan sebagai berikut, dasar-dasar Hak Asasi Manusia tertuang di dalam berbagai insrtumen internasional diantaranya

*Universal Nations of Human Rights, international Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.*¹⁶ Selain itu Hak Asasi Manusia tercantum dalam instrument nasional yaitu dalam Undang-undang Dasar 1945. Secara umum Hak Asasi Manusia yang diakui yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendapat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang lain, hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Dalam Islam Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Al-Qur'an dan hadits diaman setiap orang memiliki hak yang sama tidak ada perbedaan golongan, ras, suku, agama dan lain sebagainya. Yang membedakan antara manusia yang satu dan manusia yang lain adalah amal dan kebajikannya.

Pokok-pokok diatas dihubungkan menjadi satu kesatuan yang utuh guna memperoleh pemahaman terkait peran negara dalam melindungi hak Asasi manusia, yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan dibahas dalam bab-bab skripsi ini secara sistematis.

Selanjutnya, metode dalam menulis dengan menggunakan teori Undang-undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data awal diperoleh dari hasil pembacaan teks, konteks dan fenomena dianalisa secara bertahap dan mendalam sesuai dengan metode, teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁶ Peter Davies, *Human Rights*, terjemahan Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), h.12.

2. Hasil analisa datanya dituangkan pada pembahasan sebagai upaya untuk memberikan jawaban rumusan masalah yang dituangkan pada simpulan dalam penelitian ini.
3. Dalam penulisannya, teori perundang-undangan digunakan untuk memotret tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh penguasa di Indonesia.

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, berikut akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan penulis teliti:

Rif'an (2008), "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Pemikiran Al-Syathibi tentang Hak Asasi Manusia", dalam penelitian ini disimpulkan bahwa hak asasi merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena berasal dari Tuhan YME yang sifatnya kodrati. Dalam konsep maqasid al-syari'ah al-Syathibi bahwasanya embrio perlindungan hak-hak individu juga sudah diperankan negara dengan bukti berupa lembaga-lembaga atau departemen yang secara tidak langsung menjadi representasi dalam menjalankan maqasid al-syari'ah al-Syathibi yakni memelihara kepentingan dasar dan keluhuran martabat manusia dimuka bumi sehingga tercipta tatanan hukum

yang dapat mensejahterakan dan memberi rasa aman dalam suatu negara, terutama negara yang berdasarkan hukum.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Rif'an sama-sama membahas tentang Hak Asasi manusia dalam konsep hukum positif, perbedaannya adalah Rif'an membahas mengenai pemikiran al-Syathibi secara khusus sedangkan penelitian ini membahas mengenai konsep hukum Islam secara umum.

Abdul Rochim (2009), "Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Uud 1945 Pasca Amandemen", dalam skripsi ini disimpulkan formulasi Hak Asasi Manusia selalu berdasarkan doktrin-doktrin agama yakni terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits, secara garis besar terdapat dua pendapat mengenai Hak Asasi manusia yakni bersifat universal dan partikular. Hak-hak asasi yang diatur dalam hukum Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen sama-sama menekankan pada aspek tercipta prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan.¹⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi Abdul Rochim sama-sama membahas Hak Asasi Manusia dalam konsep Islam serta pemahaman mengenai al-Qur'an dan Hadits. Perbedaannya adalah ia mengkaji secara komperatif Hak Asasi Manusia dalam Islam dengan Hak Asasi Manusia pasca Amandemen sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dalam konsep Islam.

Imran Siswadi (2011), "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", dalam jurnal ini disimpulkan dalam hukum Islam dan

¹⁷ Rif'an, "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Pemikiran Al-Syathibi tentang Hak Asasi Manusia)". (*Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008*), h. 60.

¹⁸ Abdul Rochim, "Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Uud 1945 Pasca Amandemen". (*Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009*), h. 157.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang. Karena melanggar hak anak dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama.¹⁹

Persamaan dalam penelitian ini dengan jurnal Imran Siswadi adalah sama-sama membahas perlindungan Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Islam, perbedaannya adalah ia mengkaji perlindungan anak dalam Hak Asasi manusia secara khusus sedangkan penelitian ini membahas perlindungan Hak Asasi Manusia secara Umum.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif tanpa diikuti oleh tabel statistik dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, yakni buku-buku, majalah, jurnal.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.²⁰ Dan berkaitan dengan judul skripsi Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam.

¹⁹ Imran Siswadi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 11 No.2 (Tahun 2011), h. 238.

²⁰ Susiadi, *Metode Penelitian Hukum* (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), h.10.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara cermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian.²¹ Dan berkaitan dengan judul skripsi Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang mengikat secara langsung yang didapat dari Peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan aslinya.²² Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku-buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen dan lain-lain yang berkenaan dengan judul yang dibahas yaitu Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, langkah yang dilakukan adalah dengan survey kepustakaan dan studi literatur. Survei kepustakaan yaitu

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), cet. Ke VII, h.105.

²² H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), h.95-115.

menghimpun data dari beberapa literatur yang diperoleh di perpustakaan atau tempat lain kedalam sebuah daftar bahan pustaka, sedangkan studi literatur adalah mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka data tersebut diolah dan sekaligus di analisa, kemudian diolah dengan cara, antara lain²³:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah relevan dari data yang di peroleh dari penelitian di lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian.²⁴
- b. Sistemasi (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dari data yang diperoleh dari hasil penelitian.

5. Analisis Data

analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.²⁵

Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisa data yang dapat digunakan. Namun demikian, semua analisa data penelitian kualitatif biasanya mendasarkan bahwa analisis data di lakukan sepanjang

²³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. Ke V, h.7.

²⁴ Nadia Yuliana, "Analisis Hukum Islam Tentang Pembunuhan dengan Pemberata: Studi Pasal 339 KUHP" (Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Raden Intan, , Lampung, 2017), h. 11.

²⁵ S. Nasution, *Metodelogi Penelitian Dasar* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.72.

penelitian. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu suatu metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal atau gejala yang bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁶ Metode ini digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan tentang batasan mengenai pandangan hukum terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen yang kemudian mendapatkan pemahaman para ahli secara umum.

²⁶ Sutrisno hadi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2002), cet. Ke V. h.36.

BAB II

HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP ISLAM

A. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tidak satupun makhluk mengintervensinya apalagi mencabutnya.

Hak asasi manusia dalam bahasa Arab disebut *haq al-insaan*. Dalam lingkungan Islam sendiri ada beberapa lapisan tentang bagaimana umat Islam memandang Hak Asasi Manusia. Dalam kalangan pesantren terdapat dua konsep hak, yakni *haq al-insaan* dan hak Allah, di mana setiap hak itu saling melandasi satu dengan yang lain. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya.²⁷

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat fasilitas dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, dan setiap manusia memiliki fasilitas tersebut. Akan tetapi, level praktisnya antara manusia satu dengan manusia lainnya akan ditemukan banyak perbedaan. Hal tersebut tergantung pada sejauh mana manusia tersebut mampu mengusahakan haknya secara optimal. Untuk mengoptimalkan hak tersebut antara

²⁷ Candra Perbawati, "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 4 (Tahun 2015), h.846.

manusia satu dengan manusia lainnya saling bekerja sama dalam menghargai dan tidak mengganggu hak orang lain.²⁸

Doktrin politik Sunni mengatakan bahwa kemaslahatan umat hanya dapat terwujud jika terpenuhinya hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang. Hak yang dimaksud adalah terjaganya lima prinsip dasar:

1. *hifz al-nafs* (jiwa) yaitu memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang , secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, bebas penganiayaan dan kesewenang-wenang.
2. *hifz addiin* (agama) yaitu memberikan jaminan kepada umat Islam untuk meyakinkan agama dan keyakinannya. Islam juga memberikan kebebasan dalam beragama dan menjamin tidak ada paksaan dalam memeluk agama.
3. *hifz al-nasl* (keturunan) yaitu jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, jaminan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan dan generasi penerus yang baik dan berkualitas.
4. *hifz maal* (harta) yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda, property dan lain-lain. Larangan adanya tindakan mengambil harta orang lain, korupsi, monopoli dan lain-lain.
5. *hifz al-aql* (akal) yaitu adanya jaminan untuk berekspresi, kebebasan berpendapat, melakukan penelitian, dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini melarang terjadinya perusakan akal, penyiksaan dan pembunuhan.

²⁸ Jhon L Eposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, diterjemahkan oleh Zoon (Bandung: Mizan), h.136.

Dari kelima prinsip tersebut Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang bersifat universal dan dimiliki seseorang sepanjang waktu serta melampaui batasan geografis, agama, nasionalisme, seks, status sosial, etnis, maupun kultur.²⁹ Islam sangat menghormati hak-hak yang melekat pada diri manusia termasuk dalam hal penegakan hukum. Pengakuan dan penguatan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk menjamin terjaganya Hak Asasi Manusia. Hal ini disampaikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam yang menyatakan bahwasannya setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hukum dan kebebasan dari praduga tak bersalah sebelum diputuskan oleh hakim di pengadilan, dalam Pasal 19 berbunyi:

“Semua individu adalah sederajat di muka hukum tanpa ada perbedaan antara yang memerintah dan yang di perintah”.
“Hak Untuk mendapatkan keadilan diterima bagi orang tanggung jawab yang dipikul oleh orang yang melakukannya”
*“Tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman kecuali yang ditetapkan oleh syariat”.*³⁰

Makna yang terkandung dalam pasal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qu'an surat An-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



²⁹ Maghfur Ahmad, “Nahdatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. *Jurnal Religia*, Vol. 13 No. 2 (Tahun 2010), h.177-178.

³⁰ Laila Rahmawati, “Hak Asasi Manusia dalam Islam”. *Jurnal Transformatif*, Vol. 1 No. 2 (Tahun 2017), h. 208.

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*³¹

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa pentingnya berlaku adil sebagai realisasi terhadap Hak Asasi manusia karena penegakan hukum merupakan kebutuhan asasi agar apa yang dimiliki oleh seseorang dapat terlindungi dan orang tersebut merasa aman.

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam maka yang kita maksud adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Piagam dan proklamasi-proklamasi serta resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa dibandingkan dengan hak-hak yang disertai sanksi oleh Tuhan hak-hak yang disebut pertama tidak mengikat siapapun, sedangkan yang disebut belakangan adalah suatu bagian integral dari kepercayaan Islam. Semua muslim dan semua penguasa yang mengakui dirinya sebagai muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakannya³².

Hak Asasi Manusia tidaklah ditahbiskan secara ilahi (*divinely ordained*), juga tidak dipahami secara ilahi (*divinely conceived*) hak-hak tersebut adalah

³¹ Q.S. An_Nisa (4): 58.

³² Maulana Abul A'la Maududi, *Human Rights In Islam*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.10.

pemberian Allah sebagai konsekuensi dari manusia adalah ciptaan Allah. Hak-hak itu sifatnya kodrat (natural) dalam arti:

1. Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pengetahuan manusia
2. Setiap manusia dilahirkan dengan hak-hak tersebut
3. Hak-hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudian dibawahnya dalam hidup bermasyarakat. Adanya pemerintah, individu itu tetap otonom dan berdaulat, karenanya berdaulat di bawah setiap pemerintah. Oleh sebab itu, kedaulatan tidak dapat dipindahkan dan adanya pemerintah hanya atas persetujuan dari yang diperintah.³³

Bicara tentang hak, tidak akan terpisah dari kewajiban, karena pada hakikatnya tidak ada hak tanpa adanya kewajiban. Keduanya berjalan seimbang, dan keseimbangan inilah yang akan mewujudkan keadilan. Salah satu prinsip dalam Islam menyebutkan bahwa semua manusia adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sedangkan pemimpin bertanggungjawab atas keadilan yang menjamin semua yang di pimpinnya akan mendapatkan haknya tanpa terkecuali. Sebagai warga negara berhak mendukung yang baik dan melakukan sosial kontrol terhadap apapun yang tidak baik. Dalam hal ini tergambar bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk beriman, melarang kejahatan dan memerintahkan kebajikan.³⁴

³³ Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h.16.

³⁴ Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman dan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.11.

B. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia dalam Islam

Sejumlah teks syari'ah yang berbenturan dengan Hak Asasi Manusia merupakan *qath'i* menurut para ulama. Konsep Islam yang dianggap berbenturan dengan konsep Hak Asasi Manusia PBB.³⁵

Islam dikenal dengan agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (*tasamuh*) yang merupakan salah satu ajaran inti dalam Islam yang sejajar dengan ajaran lain seperti kasih (*rahmat*), kebijaksanaan (*hikmat*), dan keadilan (*'adl*). Al-qur'an menegaskan bahwa Islam merupakan rahmat bagi alam semesta (*rahmatan li al-alamiin*) secara terang-terangan mengakui kemajemukan keyakinan dan agama.³⁶

Dengan demikian, nilai-nilai substantif Islam bukan nilai simboliknya, sebagai sumber hukum materil yang bisa dimuat untuk dijadikan hukum positif, karena Indonesia menganut *legal realism*. Nilai-nilai substantif atau doktrin hukum Islam dapat dipositifikan dan digabungkan secara elektrik dengan doktrin-doktrin hukum barat dan hukum Adat untuk dijadikan sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia. Dengan teori konfigurasi politik maka umat Islam harus mampu duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebagai pemancaran energi politik untuk dapat memasukkan nilai-nilai substantif ajaran Islam kedalam hukum formal (hukum positif) yang berlaku di Indonesia.³⁷

³⁵ Dedy Sumardi, "*Hudud dan HAM*". *Jurnal Miqot*, Vol. 37 No.2 (Tahun 2011), h.379.

³⁶ Hasani Ahmad Said, "*Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam*". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 3 (tahun 2015), h.599.

³⁷ Siti Mahmudah, "*Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)*". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 No. 4 (Tahun 2012), h.406.

Islam Memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak yang diberikan pencipta karena manusia mempunyai keistimewaan atau kemuliaan, terdapat dalam surat Al-Isra' (17): 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَلَدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya:

*Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*³⁸

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu adam (umat manusia) tanpa terkecuali dengan bentuk tubuh yang bagus, memiliki kemampuan berinteraksi dan kebebasan dalam memilih, dan Allah memberikan kemuliaan serta kekuatan agar manusia senantiasa taat dan patuh pada perintah Allah. Allah beri mereka rezeki dan kenikmatan, dan Allah lebihkan mereka dengan akal dan pikiran dari makhluk lain yang Allah ciptakan.³⁹

Allah juga mengangkat harkat dan martabat manusia dengan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi⁴⁰, terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 30:

³⁸ Q.S. Al-Isra (17): 70.

³⁹ Tafsirq" (On-line), tersedia di: <https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-70#tafsir-Quraish-Shihab>

⁴⁰ Laila Rahmawati, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam". *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, Vol. 1 No. 2 (Tahun 2017), h.205.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".⁴¹

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah yang menghidupkan manusia dan menepatkan mereka di bumi. Dan Allah telah memberikan kepada manusia ilmu pengetahuan tentang berbagai hal, maka ingatlah nikmat yang telah Allah diberikan itu.⁴²

Dalam konsep *equality before the law* C.J.M. Schuyt seorang sosiologis Belanda pernah mengatakan konsep tersebut hanyalah angan-angan semata sebab, mengharapkan persamaan dalam keadaan yang berbeda merupakan penerapan yang sangat sulit. Al-Qur'an menjawab persoalan tersebut dalam surat Al-Hujurat (49): 13 dan Al-Maidah (5): 18

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling

⁴¹ Q.S. Al-Baqarah (2): 30.

⁴² Tafsir (On-line), tersedia di: <https://2-al-baqarah/ayat-30#tafsir-Quraish-Shihab>

*mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴³

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sama tidak ada perbedaan yakni berasal dari Adam dan Hawa. Kemudian Allah berikan keturunan dengan berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar mereka saling kenal dan saling tolong menolong dan yang membedakan diantara kalian adalah ketaqwaan.⁴⁴

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ رَبِّ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya:

*Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah: "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" (kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).*⁴⁵

Al-Qur'an menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, persamaan umat manusia yang harus taat dan patuh ke pada Allah. Agama Islam tidak mengakui adanya hak Istimewah yang di dasari

⁴³ Q.S. Al-Hujurat (54): 13.

⁴⁴ Tafsirq" (On-line) tersedia di: <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-13#tafsir-Quraish-Shihab>

⁴⁵ Q.S. Al-Maidah (5): 18.

oleh kelahiran, kebangsaan, akan tetapi kemuliaan dan amal kebajikan yang dapat membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.⁴⁶

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim telah menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia sejak awal kemerdekaan, seperti yang telah ditunjukkan oleh UUD 1945 yang secara terang-terangan menyebutkan. Hanya saja, pada masa lalu terdapat perbedaan penafsiran oleh pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia yang terkait dengan kecenderungan politiknya. Dengan legislasi Hak Asasi Manusia dan ratifikasi, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki instrumen paling lengkap tentang Hak Asasi Manusia. Konsekuensinya, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan instrumen dengan membuat langkah-langkah untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia.⁴⁷

C. Kesesuaian Antara Undang-Undang dan Konsep Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam

Secara umum, instrumen Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa mereka akan menekankan kepada negara-negara yang tergabung untuk melindungi semua masyarakatnya ke dalam yurisprudensi mereka. Konvensi Amerika menyatakan bahwa negara-negara pihak atas hal ini berjanji untuk menghormati hak dan

⁴⁶ Juraidi, *Jerat Perbudakan Masa Kini: Sebuah Kajian Tafsir dan HAM* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2003), h.60-61.

⁴⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 2003), h.34.

kebebasan yang diakui dan memastikan semua orang tunduk pada yurisprudensi mereka.⁴⁸

Dalam nomokrasi Islam hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut.⁴⁹

Terhitung sejak tahun 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde Baru yakni fase antagonistic yang bernuansa konflik, fase resiprokal yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara telah membuka pintu lebar bagi islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, maka konsep pengembangan hukum Islam yang secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam masyarakat. Kemudian diubah arahnya secara kualitatif diakomodasikan dalam berbagai perangkat aturan dan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi (*taqnin*) hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan.⁵⁰

⁴⁸ Oliver De Schutter, *International Human Rights Law* (New York: Cambridge University Press, 2010), h.124.

⁴⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2004), h.130.

⁵⁰ Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10 No. 4 (Tahun 2012), h.455-456.

Proses penanaman budaya Hak Asasi Manusia antara pemikiran barat dan pemikiran Islam tidak jauh berbeda, keduanya berdasarkan pada prinsip filosofi yang sama. Perbedaannya hanya sebatas budaya yang diterapkan pada masing-masing masyarakatnya, khususnya perbedaan sosial, politik, ekonomi, dan intelektual. Keduanya bukan berasal dari atribut yang berlawanan akan tetapi saling terkaitan antara hukum barat dan hukum Islam mengenai Hak Asasi Manusia. Keduanya memahami bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang universal.⁵¹

Dalam dunia Barat memaknai Hak Asasi Manusia lebih bersifat *antroposentris* dimana penekanan utama tertuju pada produk otak manusia yang menjadikan manusia sasaran akhir dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia tersebut. Sedangkan dalam Islam, konsep Hak Asasi Manusia dimaknai secara *theosentris* yang mengutamakan segala sesuatu berpusat kepada Tuhan.⁵²

Dasar kepentingan dan persamaan hak hidup dikembalikan pada tiga macam, yaitu:

1. Persamaan hak dalam kedudukan dan nilai kemanusiaan bermasyarakat.

Islam menetapkan bahwasannya manusia memiliki tingkat derajat kemuliaan yang sama, antara manusia satu dengan manusia lainnya tidak ada perbedaan kecuali kadar kemampuan dan perbuatannya.

Dalam sejarah Islam pernah terjadi perselisihan antara Abu Dzar Al Ghiffari dengan seorang budak sahaya bangsa Zanzi dihadapan Rasulullah

⁵¹ Mohammed Abed al-Jabri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought* (Lebanon: I.B. Tauris Publishers, 2009), h.177.

⁵² Habib Sulthon Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati". *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2012), h.28-29.

SAW. Dengan amarah Abu Dzar melontarkan kata-kata “Hai si anak hitam”, Rasulullah SAW bersabda:

“Perkataanmu sudah melampaui batas, tidak ada perbedaan antara kaum putih dan hitam, melainkan dengan ketakwaan amal masing-masing”.

Mendengar perkataan Rasulullah SAW Abu Dzar kemudian meletakkan pipinya dibumi seraya berkata “berdirilah engkau dan injaklah pipiku ini!”.

2. Persamaan hak dalam ketetapan undang-undang mengatur kepentingan kenegaraan dan lain sebagainya.

Islam menetapkan bahwasannya manusia diperlakukan atas dasar persamaan hak asasinya, baik rakyat biasa maupun bagi penguasa.

Umar bin Khatab patut menjadi teladan karena senantiasa menetapkan peraturan atas dasar keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Semasa menjadi khalifah ia pernah berkata “sesungguhnya tidak ada seorangpun diantara kalian yang lebih kuat atas yang lemah melainkan karena hak asasinya. Demikian pula tidak ada seorangpun yang lebih lemah dari pada yang kuat karena hak asasinya.

3. Persamaan hak dalam aktivitas perekonomian dan perdagangan.

Dalam bidang ekonomi Islam memberikan kebebasan untuk mengatur kehidupannya. Ada 10 bagian penting dalam mengatur ekonomi menurut ajaran Islam:

- a. Islam mengharamkan usaha yang cenderung menguntungkan diri sendiri secara berlebihan dengan menjatuhkan pihak lain

- b. Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pembagian harta warisan secara tepat dan adil
- c. Menghindari pereconomian secara monopoli.
- d. Dorongan untuk bershadaqah
- e. Tebusan karena janji (nadzar)
- f. Kewajiban membayar zakat
- g. Kewajiban berinfaq
- h. Kewenangan pemerintah mengatur keuangan
- i. Menunaikan infak dan shadaqah untuk meningkatkan persamaan hidup
- j. Bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta wajib di infakkan.⁵³

Simpati pemerintah Indonesia terhadap umat Islam di mulai pada masa Orde Baru, yang ditunjuki dengan sejumlah kebijakan politik yang diperoleh dari umat Islam.⁵⁴ Meskipun Indonesia tidak secara eksplisit mendeklarasikan konstitusionalisme Islam, akan tetapi dalam praktiknya mengadopsi prinsip-prinsip islam dan menetapkan dalam sebuah aturan hukum.⁵⁵ Dalam menetapkan undang-undang Islam tidak membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim, bahkan seorang dzimmi yang tinggal di kawasan negeri Islam hak asasi mereka tetap sama, baik menyangkut tentang hak maupun sanksi yang dibebankan kepada mereka. Semua ketentuan hukum dan undang-undang diberlakukan kepada mereka kecuali yang berhubungan dengan agama atau

⁵³ Ali Abdul Wahid Wafi, *Haququl Insan Fil Islam*, terjemahan Abu Ahmad Al-Wakidy (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991), h.13-50.

⁵⁴ Iskandar Syukur, Noor Sulastry Yurni Ahmad, "The Indonesian Islam: Law and The Ideological Perspective". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No.2 (Tahun 2014), h.245.

⁵⁵ Muhammad Siddiq Armia, "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic is Indonesia Constitution?". *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 15 No. 2 (Tahun 2018), h.447.

keyakinan. Dalam hal ini Islam tetap bersikap toleran dalam menghormati keyakinan mereka.

Hak Asasi Manusia dalam tradisi hukum Islam lebih komprehensif karena pengaturannya tidak hanya pada sesama manusia akan tetapi mengatur antara manusia dan Tuhan. Persoalan keadilan menjadi hak fundamental yang tidak dijumpai dalam konvensi Hak Asasi Manusia Barat. Islam sangat mengutamakan martabat dan individual sebagai syarat mutlak kelangsungan hidup yang berkeadilan. Adapun nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang diakui dalam Islam sama halnya dengan Hak Asasi Manusia barat dan dijadikan parameter negara dan penegak hukum dalam menciptakan keadilan.⁵⁶

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang meliputi:

1. Harkat dan martabat manusia yang terdapat dalam surat Al-Isra' (17): 33 yang artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan satu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah member kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan".
2. Prinsip persamaan yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf: 19 yang artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat yang menurut apa yang telah

⁵⁶ Jawahir Thontowi, "HAM di Negara-Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris Di Indonesia". *Jurnal Pandecta*, Vol. 8 No. 2 (Tahun 2013), h.130.

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan”.

3. Kebebasan dalam menyatakan pendapat sesuai dengan apa yang telah Islam ajarkan yakni kebebasan yang dipimpin dan dibatasi oleh wahyu Allah.
4. Kebebasan dalam memeluk agama yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah (2): 256 yang artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)...”.
5. Hak terhadap jaminan sosial yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat: 19 yang artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.
6. Hak dalam memelihara harta benda yang dijelaskan dalam hukum Islam siapapun itu baik penguasa maupun masyarakat biasa tidak diperkenankan untuk merampas hak orang lain.⁵⁷

⁵⁷ Uswatun Hasanah, “Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40 No. 4 (Tahun 2010), h.459-461

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Robby Habiba. "Paradoks Universalitas HAM Barat di Muka Cermin Islam Perspektif Filsafat Hukum dan Ham." *Jurnal Ijtihad* Volume 12 (2012): 233-134.
- Ahmad, Maghfur. "Nahdatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Religia* Volume 13 (2010).
- Alder, John. *General Principle of Constitutional and Administrative Law*. New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Ali Abdul Wahid Wafi, terjemahan Abu Ahmad Al-Wakidy. *Haququl Insan Fil Islam*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991.
- Al-Jabri, Mohammed Abed. *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*. Lebanon: I.B. Tauris Publishers, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bhineka Cipta, 2007.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Implementing Islamic Constitution: How Islamic is Indonesia Constitution?" *Jurnal Al-'Adalah* Volume 15 (2018): 447.
- Asnawi, Habib Sulthon. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati." *Jurnal Supremasi Hukum* Volume 1 (2012): 28-29.
- Asni. "Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton." *Jurnal Al-'Adalah* Volume 14 (2017): 85.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: kencana, 2004.
- Cassese, Antonio. *Hak-Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Davies, Peter. *Human Rights*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. "Hak Konstitusional Korban Atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial." *Jurnal Konstitusi* Volume 11 (2014): 273.

- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press, 2003.
- Effendi, Masyhur. *HAM dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- . *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- . *Hak Asasi Manusia Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fadhli, Yogi Zul. "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Volume 11 (2014): 358.
- Fatwa, A.M. *Hak Asasi Manusia, Fluralisme Agama dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. US: Thomson Reuters, 2004.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Hasanah, Uswatun. "Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 40 (2010): 449.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia." *Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung* 86-87.
- Hunt, Lynn. *Inventing Human Rights A History*. New York: W.W. Norton & Company, 2007.
- Ikrom, Muhammad. "Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan HAM." *Jurnal Supremasi Hukum* Volume 2 (2013): 191.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2008.
- Iskandar Syukur, Noor Sulastry Yurni Ahmad. "The Indonesian Islam: Law and The Ideological Perspective." *Jurnal Al-'Adalah* Volume 12 (2014): 245.
- Jaelani, Abdul Qodir. "Politik Hukum Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 Tentang Pembubaran BP Migas: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Panggung Hukum* Volume 1 (2015): 74.
- Juraiddi. *Jerat Perbudakan Masa Kini*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2003.
- Khairazi, Fauzan. "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia ." *Jurnal Inovatif* Volume 8 (2015).

- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Kurniawan Kunto, Nunung Prajarto. "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju Democratic Governances." *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik* Volume 8 (2005): 295-296.
- Lestari, Dewi. "Hak Asasi Manusia di Indonesia di tinjau dari Berbagai Aspek Kehidupan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 3 (2007).
- Lubis, Mulya. "Menegakkan HAM, Menggugat Diskriminas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 39 (2009): 69.
- M Cranston, *What Are Human Rights?* (New York: Basics Books, 1973. *What Are Human Rights*. New York: Basics Books, 1973.
- Mahmudah, Siti. "Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)." *Jurnal Al-'Adalah* Volume 10 (2012): 406.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Maududi, Maulana Abul A'la. *Human Rights In Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- MD, Moh. Mahfud. "Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Hukum* Volume 7 (2000).
- Moyn, Samuel. *The Last Utopia: Human Rights in History*. England: Belknap Press Of Harvard University Press, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif." *Lex Scientia Law Review* Volume 1 (2017).
- Muladi. *Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Mulyana, Asep. "Mengintegrasikan HAM ke dalam Kebijakan dan Praktik Perusahaan." *Jurnal HAM* Volume 8 (2012): 280.
- Muqoddas, Djazimah. *Kontroversi Hakim Perempuan pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*. Yogyakarta: PT LKis, 2011.

- Mustofa, Muhammad. "Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum dan Ketertiban Sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 35 (2005): 205.
- Nasution, Aulia Rosa. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani." *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* Volume 8 (2016): 203-205.
- Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Jurnal Al-'Adalah* 13 (2016): 9.
- Nasution, S. *metodelogi Penelitian Dasar*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Perbawati, Candra. "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Adalah* Volume 12 (2015).
- Prinst, Darwan. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)* Volume 1 (2017): 205.
- RI, Departemen Agama. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- . *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010.
- Rif'an. *Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Pemikiran Al-Syathibi Tentang Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Rochim, Abdul. *Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen*. Yogyakarta: Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Said, Hasani Ahmad. "radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah* Volume 12 (2015): 599.
- Said, Hasani Ahmad. "Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-'Adalah* 12 (2015): 599.
- Schutter, Oliver De. *International Human Rights Law*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Siswadi, Imran. "Perlindungan Anak dalam Perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Al-Mawarid* Volume 11 (2011).
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

- Sulaiman, Rahmah. "Peran Pemerintah RI dalam Menanggapi Tuduhan Atas Pelanggaran HAM di Papua." 20. Medan : Skripsi Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Sumardi, Dedy. "Hudud dan HAM." *Jurnal Miqot* Volume 37 (2011): 379.
- Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia." *Jurnal Al-'Adalah* Volume 10 (2012): 455-456.
- Suparmin. "Rekonsiliasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Perspektif Hukum Agama." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 44 (2015): 175.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Volume 2 (2014): 166.
- Susiadi, Metode Penelitian Hukum (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), h.10. Metode Penelitian Hukum. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.
- Sutopo, H.B. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Thontowi, Jawahir. "HAM di Negara-Negara Muslim dan Realitas Perang Melawan Teroris Di Indonesia." *Jurnal Pandecta* Volume 8 (2013): 130.
- Triyanto. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Widjojanto, Bambang. "Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal." *Jurnal Hukum Prioris* Volume 3 (2012): 30.
- Yuliana, Nadia. Analisis Hukum Islam Tentang Pembunuhan dengan Pemberatan: Studi Pasal 339 KUHP. Lampung: Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Raden Intan, 2017.
- Zein, Yahya Ahmad. "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dan HAM)." *Ilmu Hukum* Volume 1 (2015).